**PENGARUH IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH, KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

 **KABUPATEN MUSI RAWAS**

**Nadya Sumadanipa 1, Indrawati Mara Kesuma 2, Martini 3**

1, 2,3Program Studi Akuntansi, Universitas Bina Insan, LubukLinggau, Indonesia

**Email: 1****nadyasumadanipa04@gmail.com,2indrawatiMarakesuma3@univbinainsan.ac.id,  3 martinidhasman@univbinainsan.ac.id**

**Abstrak**

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengaruh implementasi sistem informasi manajemen daerah, kualitas sumber daya manusia dan penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Musi Rawas. Populasi pada penelitian ini berjumlah 1.804 pegawai yang bekerja pada 24 dinas di Kabupaten Musi Rawas. Sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria tertentu, sehingga sampel pada penelitian berjumlah 120 responden dengan memilih 5 responden pada masing-masing dinas. Dan analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi linear berganda dengan pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS versi 25 *for windows*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem informasi manajemen daerah, kualitas sumber daya manusia dan penerapan standar akuntansi pemerintahan baik secara simultan maupun parsial berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Musi Rawas.

**Kata kunci—**Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah, Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Laporan Keuangan.

***Abstract***

 *The purpose of this study was to describe the effect of theimplementation of regional management information systems, the quality of human resources and the application of government accounting standars on the quality of local government financial reports in Musi Rawas Regency. The population in this study amouted to 1.804 employees who work in 24 offices in Musi Rawas Regency. The sample in this study used a purposive sampling technique based on certain criteria, so that the sample in this study amounted to 120 respondents by selecting 5 respondents in each service. And the analysis used is multiple linear regression analysis method with data processing using SPSS version 25 for windows application. The results show that the implementation of regional management information systems, the quality of human resources and the application of government accounting standards both simultanneously and partially have a significant effect on the quality of government financial reports Musi Rawas Regency area*.

***Keywords***—*Implementation of Regional Management Information System, Quality of Human Resources, Implementation of Government Accounting Standars, Quality of Financial Reports*

1. **PENDAHULUAN**

 Era modernisasi saat ini telah membuat setiap negara termasuk Indonesia membutuhkan suatu sistem pemerintahan yang baik, teratur dan terintegrasi atau yang biasa dikenal dengan *good governance.* Negara Indonesia telah menerapkan suatu sistem otonomi daerah yang merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penerapan otonomi daerah ini telah mendorong pemerintahan daerah untuk mengatur dan berkewajiban mengurus pengelolaan keuangannya sendiri.

 Penyampaian hasil pertanggungjawaban berupa laporan keuangan merupakan salah satu cara agar pemerintah daerah dapat mempertanggungjawabkannya dalam upaya mewujudkan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah adalah salah satu cara pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya ekonomi yang digunakan oleh pemerintah dari waktu ke waktu (Ariska et al., 2019). Kualitas laporan keuangan merupakan standar yang harus dipenuhi oleh informasi akuntansi untuk mencapai tujuanya (Orlanda et al., 2020). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan karakteristik yang merupakan prasyarat normatif yang di perlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu 1) relevan, 2) andal, 3) dapat di bandingkan dan 4) dapat di pahami.

Pemerintah tentunya membutuhkan suatu aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Aplikasi ini telah dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang mulai diperkenalkan pada tanggal 29 Agustus 2006 yang merupakan salah satu hasil dari teknologi sistem informasi yang banyak digunakan pemerintah daerah Indonesia untuk mengelola keuangan daerahnya(Ariska et al., 2019). Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Daerah Sampai dengan tanggal 30 Juni 2020, jumlah pemerintah daerah yang menggunakan Program aplikasi SIMDA sebanyak 440 pemerintah daerah dari 542 pemerintah daerah yang ada. Jumlah pemerintah daerah tersebut antara lain: SIMDA Keuangan telah diterapkan oleh 394 Pemda, SIMDA BMD 403 Pemda, SIMDA Gaji 51 Pemda, SIMDA Pendapatan 169 Pemda, SIMDA Integrated 196 Pemda, Dashbard Keuangan 5 Pemda, dan Koneksi CMS terdiri dari 225 Pemda.

Pemerintah juga membutuhkan *user* atau Sumber Daya Manusia yang mempunyai kemampuan dan keterampilan dalam menunjang proses pengelolaan keuangan yang dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik khususnya dalam menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya dengan pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang memadai dapat diartikan sebagai kualitas sumber daya manusia (Wardani & Andriyani, 2017).

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) juga menjadi salah satu faktor penting dalam menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas. Standar Akuntansi Pemerintahan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010. Pada tahun 2015 seluruh instansi pemerintah baik yang ada di pusat maupun di daerah diwajibkan membuat laporan keuangan pemerintah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual (Ardianto, 2019). Menurut Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

 Berdasarkan penelitian terdahulu tentang implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) terhadap kualitas laporan keuangan telah dijalankan oleh Diana et al., (2018) menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) khususnya di Kabupaten Nias. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Ariska et al., (2019) yang menyatakan bahwa variabel penerapan SIMDA berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD di Kabupaten Sumbawa, namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fahrurrozi, (2019)yang menunjukkan bahwa penggunaan SIMDA tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada provinsi Nusa Tenggara Barat. Menurut temuan penelitian ini, masih ada ruang untuk perbaikan dalam hal efisiensi SIMDA dalam menghasilkan laporan keuangan berkualitas tinggi. Hal ini diperlukan agar SIMDA mampu menghasilkan informasi keuangan yang dapat dipercaya dan relevan untuk pengambilan keputusan.

 Penelitian terkait kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dilakukan oleh Hendri & Nr, (2020) menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia memiliki pengaruh yang positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah khususnya pada OPD Provinsi Sumatera Barat, hal serupa juga dilakukan Orlanda et al., (2020) yang menemukan bahwa kualitas laporan keuangan baik secara simultan maupun parsial dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, sedangkan Putri et al., n.d.(2017) menemukan bahwa kualitas sumber daya manusia secara parsial tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota Bandung, selain itu (Kurniawati, 2018) juga menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar.

Penelitian yang dilakukan oleh Ikriyati & Aprila, (2019) menemukan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan di Kabupaten Seluma, temuan penelitian ini juga didukung oleh penelitian (Yanti, 2020) yang mengklaim bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di kota Malang secara simultan dipengaruhi oleh penerapan standar akuntansi pemerintah, tetapi bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Azzindani et al., (2019) yang menemukan bahwa variabel penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah Lombok Tengah, ini disebabkan bahwa dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah telah diwajibkan dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan sehingga pemerintah daerah tidak merasakan dampak yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tersebut.

Implementasi suatu aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), kualitas sumber daya manusia dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan telah menjadi faktor-faktor penting dalam menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas sehingga setiap daerah di Indonesia selalu ingin meningkatkan kualitas laporan keuangan agar bisa mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan dana publik.

Kabupaten Musi Rawas merupakan salah satu Kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang terus berupaya dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dengan selalu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi terhadap laporan keuangan daerah, namun menurut pengamatan peneliti bahwa dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Musi Rawas masih memiliki beberapa hambatan diantaranya adalah masih kurangnya pemahaman user atau pengguna SIMDA terhadap siklus laporan keuangan pada software SIMDA, maka tentunya hal ini dapat menghambat dalam proses penyusunan laporan keuangan, selain itu penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang masih tergolong baru dilingkungan pemerintah sehingga sebagian pegawai belum memahami secara penuh standar akuntansi pemerintahan dan pencatatan laporan keuangan yang dilakukan dengan aplikasi keuangan yang digunakan serta masih kurangnya sumber daya manusia yang mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, selain itu juga masih kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten dan memiliki keterampilan di bidang akuntansi. Berdasarkan *research gap* dan fenomena yang terjadi, maka peneliti tertarik mengambil judul "**Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Musi Rawas**".

**Rumusan Masalah**

1. Apakah Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas?
2. Apakah Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas?
3. Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas?
4. Apakah Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas?

**Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memahami Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas.

1. **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian ini adalah menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif untuk menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada 24 Dinas di Kabupaten Musi Rawas yang berjumlah sebanyak 1.804 orang/pegawai. Selanjutnya, teknik pengambilan Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis *Purposive Sampling* yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu**.** Kriteria yang digunakan pada penelitian ini adalah pegawai yang bekerja di bidang keuangan pada dinas-dinas di Kabupaten Musi Rawas, pegawai yang terlibat langsung dalam proses pengelolaan dan pelaporan keuangan, dan pegawai yang terlibat langsung dalam penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), sehingga sampel pada penelitian ini dari 24 dinas adalah berjumlah 120 dengan memilih 5 responden, antara lain Kepala sub bagian keuangan, bendahara pengeluaran, bendahara gaji, bendahara barang dan staf keuangan pada masing-masing dinas di Kabupaten Musi Rawas.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data primer melalui kuesioner kepada pegawai yang bekerja di bagian keuangan di dinas-dinas Kabupaten Musi Rawas. Pengumpulan data menggunakan metode pendekatan survei yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuisioner atau angket. Selanjutnya, data akan diolah dan dianalisis menggunakan SPSS *Statistic* Versi 25 *For Windows* dengan beberapa tahapan yaitu diantaranya uji deskriptif, uji validitas dan reabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis.

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan Rincian penyebaran kuesioner menunjukan bahwa dari 120 kuesioner yang disebar, terdapat 28 kuesioner yang tidak mendapatkan respon atau tidak kembali, hal ini dikarenakan tidak adanya waktu bagi sebagian pegawai yang bekerja dibagian keuangan, tingkat kesibukan pegawai menjadi alasan utama mengapa angka kuesioner yang tidak kembali sebanyak 28 kuesioner atau 23,3% dari kuesioner yang disebarkan, sehingga kuesioner yang kembali dan dapat diolah hanya sebanyak 92 kuesioner dengan tingkat persentase 76,7% dari kuesioner yang dibagikan, namun data yang kembali sudah cukup untuk melakukan penelitian ini.

**Tabel 1. Rincian Data Penyebaran Kuesioner**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Keterangan** | **Jumlah Responden (Orang)** | **Persentase (%)** |
| 1 | Kuesioner yang disebar | 120 | 100.0 |
| 2 | Kuesioner yang kembali | 92 | 76.7 |
| 3 | Kuesioner yang tidak kembali | 28 | 23.3 |

Sumber : Data primer yang diolah, tahun 2022.

**Uji Deskriptif**

Berdasarkan hasil analisis deskriptif dalam penelitian ini menggunakan analisis TCR (Tingkat Capaian Responden) terhadap penyebaran kuisioner atau angket yang telah dilakukan. Berdasarkan kuisioner yang diajukan kepada responden yang berjumlah 92 orang dengan 12 item pernyataan untuk variabel Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (X1). variabel Kualitas Sumber Daya Manusia (X2) berjumlah 11 pernyataan, variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X3) berjumlah 21 item pernyataan dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) berjumlah 10 item pernyataan. Dari hasil penyebaran angket yang telah dilakukan deskripsi ini akan menjelaskan persentase dan kategori pencapaian responden untuk dapat mengetahui kriteria responden, selanjutnya, data diolah menggunakan SPSS *Statistic* versi 25 *for windows* dengan menggunakan rumus sebaagai berikut:

TCR = $\frac{rata-rata skor}{5}$x 100 Sumber: (Siska & Zulhadie, 2020)

Interprestasi data deskriptif dilakukan dengan cara melihat kategori TCR sebagai berikut:

**Tabel. 4.7 Rentan Skala TCR**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kisaran TCR** | **Kategori**  |
| 86% - 100% | Sangat Baik |
| 71% - 85% | Baik |
| 56% - 70% | Cukup |
| 41% - 55% | Kurang Baik |
| 0% - 40% | Tidak Baik |

Sumber: (Siska & Zulhadie, 2020)

Berdasarkan hasil yang diketahui bahwa distribusi frekuensi variabel implementasi sistem informasi manajemen daerah memperoleh Tingkat Capaian Responden sebesar 85,53% dengan demikian dapat dikatakan bahwa implementasi sistem informasi manajemen daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Musi Rawas memiliki kriteria **“Sangat Baik”**. Dapat disumpulkan implementasi sistem informasi manajemen daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Musi Rawas berindikasi bahwa hasil penelitian mendapatkan respon yang positif.

Selanjutnya, informasi bahwa distribusi frekuensi variabel kualitas sumber daya manusia memperoleh Tingkat Capaian Responden sebesar 81,92% dengan demikian dapat dikatakan bahwa kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Musi Rawas memiliki kriteria **“Baik”**.

Hasil menunjukkan bahwa distribusi frekuensi penerapan standar akuntansi pemerintahan memperoleh Tingkat Capaian Responden sebesar 83,48% dengan demikian dapat dikatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Musi Rawas memiliki kriteria **“Baik”**.

Hasil distribusi frekuensi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah memperoleh Tingkat Capaian Responden sebesar 85,06% dengan demikian dapat dikatakan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah memiliki kriteria **“Sangat Baik”**.

**Tabel 2.Hasil Uji Distribusi Tingkat Capaian Responden**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Variabel** | **TCR (%)** | **Kriteria** |
| 1. | Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah | 85,53 | Sangat Baik |
| 2. | Kualitas Sumber Daya Manusia | 81,92 | Baik |
| 3. | Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan | 83,48 | Baik |
| 4. | Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 85,06 | Sangat Baik |

Sumber: Hasil Penelitian, 2022 dibantu menggunakan SPSS Versi 26

**Uji Validitas dan Reliabilitas**

**Uji Validitas**

 Uji validitas dilakukan dengan menggunakan validitas kontruk *(contruct validity)* pada masing-masing item pernyataan kuesioner dengan 92 responden diperoleh r-tabel sebesar 0,1707 pada tingkat signifikan 5% dan dibandingkan dengan nilai r-hitung yag diketahui dari nilai output SPSS maka hasil output uji validitas memiliki nilai r-hitung > r-tabel 0,1707 sehingga dinyatakan valid. Artinya, semua item pernyataan berjumlah 54 pernyataan yang ada dalam kuisioner tersebut dapat dijadikan sebagai alat ukur yang valid dalam analisis selanjutnya.

**Uji Reliabilitas**

 Uji reliabilitas terhadap item-item ini diukur melalui koefisien alpha *(Cronbach alpha).* Suatu variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai *cronbach alpha* > 0,60 (Duli, 2019:106). Hasil uji reliabilitas data dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Variabel Pertanyaan** | **Item Pernyataan** | **Koefisien*****Cronbach Alpha*** | **Kesimpulan** |
| Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (X1) | 12 | 0,754 | Reliabel |
| Kualitas Sumber Daya Manusia (X2) | 11 | 0,696 | Reliabel |
| Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X3) | 21 | 0,847 | Reliabel |
| Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) | 10 | 0,676 | Reliabel |

Sumber : Hasil pengolahan data SPSS 25 *for windows*, tahun 2022

**Uji Asumsi Klasik**

**Uji Normalitas**

Uji Normalitas dapat dilihat pada uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas yakni: jika nilai signifikansi lebih besar dari α=0,05 maka data tersebut berdistribusi normal. Hasil pengujian normalitas adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. Hasil Uji Normalitas**

|  |
| --- |
| **One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test** |
|   |   | **Unstandardized Residual** |
| N |   | 92 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) |   | .200c,d |

Sumber: Data primer diolah dengan program SPSS 25 *for windows,*tahun 2022

 Berdasarkan tabel output SPSS tersebut diketahui bahwa nilai signifikasi Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 > 0,05. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji *Kolmogorov-smirnov*, dapat diartikan data tersebut cenderung berdistribusi normal.

**Hasil Uji Multikolinearitas**

Tujuan dari uji multikolinearitas adalah untuk mendapati apakah variabel independen pada model regresi linear berganda berkorelasi tinggi dengan dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) dimana Jika nilai *tolerance* > 0,1 dan VIF < 10.00 maka artinya tidak terjadi multikolinearitas terhadap data yang diuji (Duli, 2019:120).

**Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Model** | **Collinearity Statistics** | **Keterangan** |
| **Tolerence** | **VIF** |
| (Constant) |  |  | Bebas Multikolinearitas |
| Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah  | 0,546 | 1.832 |
| Kualitas Sumber Daya Manusia | 0,543 | 1.843 |
| Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan | 0,405 | 2.468 |

Sumber: Data primer diolah dengan program SPSS 25 *for windows,* tahun 2022

**Hasil Uji Heterokedastisitas**

 Uji Heterokedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji Heterokedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji glejser dengan dasar pengambilan keputusan yakni:Jika nilai signifikansi > ɑ = 0.05 maka kesimpulannya adalah tidak terjadi heterokedastisitas.Berikut hasil uji heterokedastisitas.

**Tabel 6. Uji Heteroskedastisitas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel** | **Signifikansi** | **Keterangan** |
| Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah | 0,794 | Tidak terjadi heteroskedastisitas |
| Kualitas Sumber Daya Manusia | 0,191 | Tidak terjadi heteroskedastisitas |
| Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan | 0,318 | Tidak terjadi heteroskedastisitas |

Sumber: Data primer diolah dengan program SPSS 25 *for windows,* tahun 2022

**Hasil Uji Autokorelasi**

Uji Autokorelasi pada penelitian ini dilakukan dengan uji Durbin-Watson dengan dasar pengambilan keputusan menurut (Priyastama, 2017). yaitu dengan melihat DU < DW < 4-DU maka diterima yang berarti tidak terjadi autokorelasi.

**Tabel 7. Uji Autokorelasi**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Model** | **Durbin-Watson** | **Ket** |
| Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 1.960 | Tidak terjadi autokorelasi |

Sumber: Data primer diolah dengan program SPSS 25 *for windows,* tahun 2022

**Teknik Analisis Data**

**Hasil Regresi Linear Berganda**

**Tabel 8. Hasil Regresi Linear Berganda**

|  |  |
| --- | --- |
| **Model** | **Unstandardized Coefficients** |
| **B** | **Std. Error** |
| 1 | (Constant) | 10.586 | 3.132 |
|  | Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah | 0,138 | 0,068 |
|  | Kualitas Sumber Daya Manusia | 0,212 | 0,077 |
|  | Standar Akuntansi Pemerintahan | 0,172 | 0,053 |

Sumber: Data primer diolah dengan program SPSS 25 *for windows,* tahun 2022

Hasil output data pada kolom bagian U*nstandardized Coefficient* makadapat disusun persamaan linear berganda sebagai berikut:

**Y = a + b1X1 +b2X2 + b3X3 + e**

**Y = 10.586 + 0,138 + 0,212 + 0,172 + 3.132**

Dari persamaan diatas maka dapat disimpulkan bahwa nilai dari konstanta (a) sebesar 10.586 artinya yaitu semua variabel independent atau bebas pada penelitian ini, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (X1), Kualitas Sumber Daya Manusia (X2) dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X3), nilainya sama dengan 0 maka Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah nilainya sama dengan 10.586. Pada variabel Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (X1) nilai koefisiennya yaitu 0,138 yang artinya hubungan variabel Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu positif atau searah.

Selanjutnya, Variabel Kualitas Sumber Daya Manusia (X2) memiliki nilai koefisien regresi bersifat positif yaitu 0,212. Dan, Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X3) memiliki nilai koefisien regresi bersifat positif dan searah yaitu 0,172.

**Uji Hipotesis**

**Koefisien Determinasi**

**Tabel 9. Hasil Uji Determinasi**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Model** | **R** | **R Square** | **Adjusted R Square** | **Std. Error of the Estimate** |
| 1 | .735a | .540 | .524 | 1.447 |

 Koefisien determinasi sebesar R² (R *Square*) sebesar 0,540 (54.0%) artinya implementasi sistem informasi manajemen daerah (X1), kualitas sumber daya manusia (X2) dan standar akuntansi pemerintahan (X3) secara bersama-sama memberikan kontribusi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) di Kabupaten Musi Rawas dan setelah disesuaikan nilai sisanya 100 – 54,0% = 46,0% dipengaruhi variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

**Uji F (Simultan)**

**Tabel 10. Hasil Uji Secara Simultan (uji F)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Model** | **F** | **Sig.** |
| 1 | Regression | 34.453 | .000b |
| Residual |  |  |
| Total |  |  |

 Berdasarkan hasil analisis pengujian dengan SPSS 25 dapat dilihat bahwa F-hitung yang diperoleh adalah sebesar 34.453 dan F-tabel sebesar 2,71. Karena nilai F-hitung lebih besar dari F-tabel (34.453 > 2,71) dengan tingkat kemaknaan secara simultan signifikansinya adalah 0,000 < (α)= 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian secara simultan dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem informasi manajemen daerah, kualitas sumber daya manusia dan penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Musi Rawas.

**Uji t (Parsial)**

**Tabel 11. Hasil Uji Secara Parsial (uji t)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Model** | **T** | **Sig.** |
|
| 1 | (Constant) | 3.380 | .001 |
| Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah | 2.025 | .046 |
| Kualitas Sumber Daya Manusia | 2.773 | .007 |
| Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan | 3.269 | .002 |

Sumber: Data primer diolah dengan program SPSS 25 *for windows,* tahun 2022

Hasil uji pada tabel diketahui nilai t-hitung 2,025 > 1,662 dan nilai signifikansi sebesar 0,046 < 0,05 . Hal ini menunjukkan secara parsial Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Musi Rawas.

Nilai t-hitung variabel kualitas sumber daya manusia sebesar 2,773 > 1,662 dan nilai signifikansi sebesar 0,007 < 0,05. Hal ini menunjukkan secara parsial Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Musi Rawas.

Nilai t-hitung variabel penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan aadalah sebesar 3,269 > 1,662 dan nilai signifikansi adalah sebesar 0,002 < 0,05 dan Hal ini menunjukkan secara parsial Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Musi Rawas.

**Pembahasan**

1. **Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas**

Hasil analisis statistik dalam penelitian ini ditemukan bahwa Hipotesis Pertama (H1) menunjukkan adanya pengaruh antara implementasi sistem informasi manajemen daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Musi Rawas, ini dibuktikan dari hasil uji t atau secara parsial menunjukan nilai t-hitung = 2.025 lebih besar dari nilai t-tabel = 1,662, dengan tingkat signifikansi 0,046 < 0,05.

 Penelitian ini berhubungan dengan teori *stewardship* yang menggambarkan hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi, maka tercapainya kesuksesan dalam sebuah organisasi pemerintah itu bisa ditingkatkan dengan memaksimalisasikan utilitas *principals* dan manajemen, maka dengan adanya Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan dapat meningkatkan kinerja manajemen untuk mencapai tujuan dalam menyajikan laporan keuangan dengan tepat waktu.

 Hasil Penelitian ini juga didukung dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Diana et al.,2018) yang menyatakan bahwa semakin tinggi penggunaan sistem informasi manajemen daerah, maka kualitas laporan keuangan akan semakin meningkat, hasil penelitian menujukkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. dipengaruhi oleh variabel implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah.

1. **Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas**

Hasil analisis statistik dalam penelitian ini ditemukan bahwa Hipotesis Kedua (H2) menunjukkan adanya pengaruh antara kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Musi Rawas. Hal ini dibuktikan dari hasil uji t atau secara parsial menunjukan nilai t-hitung = 2.773 lebih besar dari nilai t-tabel = 1,662, dengan tingkat signifikansi 0,007 < 0,05, sehingga H2 diterima.

 Sejalan dengan teori *stewardship yang* menyatakan bahwa para manajemen lebih mementingkan tujuan utama, khususnya kepentingan organisasi dibandingkan untuk tujuan-tujuan individu atau kepentingan mereka sendiri, oleh karena itu peran kualitas sumber daya manusia sangat dibutuhkan dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

 Hasil Penelitian ini juga didukung oleh penelitian (Hendri & Nr, 2020) dan penelitian (Orlanda et al.,2020) menyatakan bahwa sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan dan ahli dibidangnya terhadap pengelolaan keuangan tentunya dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan SKPD. Hasil penelitian ini telah menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia baik secara simultan maupun parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

1. **Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas.**

Hasil penelitian ini ditemukan bahwa Hipotesis Ketiga (H3) menunjukkan adanya pengaruh antara penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Musi Rawas, dapat dibuktikan dari hasil uji t atau secara parsial menunjukan nilai t-hitung = 3.269 lebih besar dari nilai t-tabel = 1,662, dengan tingkat signifikansi 0,002 < 0,05.

 Sesuai dengan teori *stewardship* jugamenyebutkan bahwa pemerintah berperan sebagai *steward*, yaitu Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan pengguna informasi keuangan pemerintah dengan informasi yang berguna,, maka dengan begitu melalui Standar Akuntansi Pemerintahan bisa mendapatkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan keinginan prinsipal.

 Hal ini dikuatkan oleh penelitian yang dilakukan oleh (Ikriyati & Aprila, 2019) yang membuktikan hasil tersebut menunjuukan bahwa semakin tinggi kualitas laporan keuangan yangdisajikan oleh pemerintah daerah maka semakin baik penerapan SAP. Artinya, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah.

1. **Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas**.

 Hipotesis Keempat (H4) adanya pengaruh implementasi sistem informasi manajemen daerah, kualitas sumber daya manusia dan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Musi Rawas. dibuktikan dengan nilai F-hitung 34,453 > nilai F-tabel 2,71 dan berdasarkan tingkat signifikansinya adalah 0,000 < 0,05, hal ini menujukan Ho ditolak dan Ha diterima.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Musi Rawas, 2) Kualitas Sumber Daya Manusia secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Musi Rawas, 3) Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Musi Rawas, 4) Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Penerapan Standar Akuntansi Pemeirntahan secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Musi Rawas.

Penelitian ini memiliki keterbatasan antara lain yaitu penelitian ini hanya dilakukan pada dinas-dinas di Kabupaten Musi Rawas, oleh karena itu peneliti selanjutnya diharapkan tidak hanya melakukan penelitian pada dinas-dinas Kabupaten Musi Rawas saja, namun juga bisa kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Musi Rawas. Selain itu penelitian ini hanya menggunakan dua variabel yaitu independen dan satu variabel dependen, oleh karena itu sangat disarankan untuk mengembangkan variabel yang digunakan hingga menggunakan efek mediasi atau moderasi untuk melihat pengaruh yang lebih kompleks.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ardianto, R. (2019). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah,Pemanfaatan Teknologi Informasi,Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kaualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Wilayah Kabupaten Tangerang)*. Jurnal Bina Akuntansi, *6*(1), 95–136.

Ariska, C., Masniadi, R., & Rachman, R. (2019). *Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Skpd Di Kabupaten Sumbawa.* Jurnal Riset Kajian Teknologi dan Lingkungan, *2*(1), 15–23.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 2020. Retrieved February 15, 2022, from https://www.bpk.go.id/news/ragam-opini-bpk

Diana, P., Eforis,Chermian, & Osesoga, M.S. (2018). *Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nias*. *Ultima Accounting*, *10*, 14.

Duli, N. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Cetakan ke-1). Deepublish.

Dwitayanti, Y. (2019). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Banyuasin*. Jurnal Akuntanika, *5*(1), 1–11.

Fahrurrozi, H. (2019). *Pengaruh Penggunaan Simda Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Dampaknya Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Barang Milik Daerah*. *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, *2*(2), 124–138. https://doi.org/10.29303/akurasi.v2i2.20

Fauziah, I. (2018). *Standar Akuntansi Pemerintahan* (Cetakan ke-1). Ilmu Media Publishing.

Hendri, M., & Nr, E. (2020). *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.* Jurnal Eksplorasi Akuntansi, *2*(1), 2479–2493. https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.224

Diana, P., Eforis,Chermian, & Osesoga, M.S. (2018). *Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nias.* Ultima Accounting, 10, 14.

Ikriyati, T., & Aprila, N. (2019). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma*. Jurnal Akuntansi, *9*(2), 131–140. https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.2.131-140

Kurniawati. (2018). *Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (Simda), Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Dan Dukungan Manajemen Puncak Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada OPD Kabupaten Karanganyar)*. 17.

Orlanda, H., Gowon, M., & Erwati, M. (2020). *Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Dinas-Dinas Di Provinsi Jambi).* Jambi Accounting Review, *1*(2), 165–183.

PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 2017. (n.d) Retrieved February 19, 2022, from https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5095/pp-no-71-tahun-2010

Priyastama, R. (2017). *Bukti Sakti Kuasai SPSS Pengolahan Data & Analisis Data* (Cetakan I). Start UP.

Situs Resmi BPKP 2022. (n.d). Retrieved February 15, 2022, from https://www.bpkp.go.id/sumsel/konten/1916/Perkembangan-Opini-Laporan-Keuangan-Pemda.bpkp

Situs Resmi BPKP 2022. (n.d). Retrieved February 15, 2022, from https://www.bpkp.go.id/sakd/konten/333/Versi-2.1.bpkp

Siska, A. J., & Zulhadie, I. (202 C.E.). *Analisa Pengaruh Citra Merek dan Kualitas Produk terhadap Minat Beli Produk Xiaomi (Studi Kasus pada Mahasiswa STIE HAS Bukittinggi).* Jurnal Sosial Dan Ilmu Ekonomi, Volume V, Nomor 01, 1–14.

Sudarmanto. (2018). *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM* (Cetakan Ke-3). Pustaka Belajar.

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Edisi 2, Cetakan ke-1). Alfabeta.

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2014. (n.d) Retrieved January 26, 2022, from https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014

UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2015. (n.d). Retrieved January 26, 2022, from https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38209/uu-no-9-tahun-2015

Wardani, D. K., & Andriyani, I. (2017). *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Klaten.* Jurnal Akuntansi, *5*(2), 88–98. https://doi.org/10.24964/ja.v5i2.270

Yanti, N. S. (2020). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada OPD Kota Malang)*. *8, No 1*, 8.